

**PAPUANS
BEHIND BARS**



Papuans Behind Bars

LAPORAN

TRIWULAN

April–Juni 2024

Diterbitkan pertama kali pada 2024
oleh Papuans Behind Bars dan TAPOL
papuansbehindbars.org | tapol.org

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).
Anda bebas mendistribusikan, mengubah, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau
format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta.
Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sampul: Foto oleh Alexander Loen/Jubi

Papuans Behind Bars

Laporan Triwulan

April–Juni 2024

Ringkasan

Selama April hingga Juni 2024, kami melihat adanya lonjakan 112 penangkapan sewenang-wenang (dari 114 insiden penangkapan) dibandingkan dengan hanya 22 penangkapan sewenang-wenang selama kuartal sebelumnya (Januari dan Maret 2024). Setidaknya tiga orang yang ditangkap dalam periode ini kemudian diadili lebih lanjut. Kami juga mencatat 15 kasus penahanan sewenang-wenang, 3 kasus penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, dan 4 kasus eksekusi di luar hukum.

Selama periode ini, setidaknya 4 orang (3 orang ditangkap pada 2023 dan 1 orang ditangkap pada Februari 2024) telah divonis bersalah oleh pengadilan. Penangkapan mereka terkait dengan konflik bersenjata di West Papua, dengan hukuman mulai dari tiga tahun hingga seumur hidup.

Latar Belakang

Periode ini masih menunjukkan tren konflik bersenjata yang sedang berlangsung di West Papua. Pada 11 April, seorang komandan militer lokal (Danramil) di Kabupaten Paniai ditembak mati, diduga dilakukan oleh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB).¹

Pada pertengahan April, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres No. 15/2024) tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berencana untuk membangun perkebunan tebu dan industri bioetanol dan pembangkit listrik tenaga biomassa yang terintegrasi di Merauke. Proyek ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan membutuhkan sekitar dua juta hektar lahan (lebih dari setengah wilayah Belanda) dengan nilai investasi sekitar US\$8 miliar.² Proyek ini belum mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa): tidak ada konsultasi yang

¹ Detik.com, “Danramil 1703-04/Aradide Gugur Ditembak OPM di Paniai”, 12 April 2024, tersedia di <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7289263/danramil-1703-04-aradide-gugur-ditembak-opm-di-paniai>.

² Mongabay, “Jutaan Hektar jadi Kebun Tebu, Was-was Nasib Orang Papua”, 23 Mei 2024, tersedia di <https://www.mongabay.co.id/2024/05/23/jutaan-hektar-jadi-kebun-tebu-was-was-nasib-orang-papua/>.

berarti dengan masyarakat adat Papua.³ Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) juga khawatir bahwa proyek ini akan membahayakan hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah dan mata pencaharian serta memicu deforestasi dan degradasi lingkungan.



Spanduk penyambutan Presiden Jokowi oleh PT Global Papua Abadi, sebuah perusahaan perkebunan tebu yang beroperasi di Merauke, sekitar bulan Juli 2024.

Sumber: PUSAKA

Pada pertengahan Juni, Bupati Sorong Selatan mengeluarkan pengakuan resmi atas hutan adat dengan luas 97.000 hektar (sekitar 1,5 kali luas Jakarta) yang dihuni oleh lebih dari 50 suku.⁴ Hal ini merupakan hasil kerja bersama antara lembaga swadaya lokal (LSM) lokal, nasional, dan internasional, serta kemungkinan besar dipengaruhi oleh kampanye “All Eyes on Papua”.⁵

Sebuah pengadilan publik yang dikenal sebagai Pengadilan Rakyat Permanen (Permanent Peoples Tribunal/PPT) tentang West Papua telah diselenggarakan di London, Inggris, pada 27-29 Juni lalu.⁶ Pengadilan alternatif ini berfokus pada dugaan pelanggaran HAM yang sistematis, represi negara, marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat adat Papua, perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan perusakan lingkungan. PPT mendengarkan kesaksian

³ Hal ini mengikuti pola yang terlihat pada megaprojek serupa lainnya di Merauke seperti proyek lumbung pangan nasional tahun 2020 dengan dalih membangun ketahanan pangan untuk merespons pandemi COVID-19 atau Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diluncurkan pada 2010. Lihat TAPOL dan awasMIFEE!, “Peran Militer dalam Rencana Food Estate”, September 2022, tersedia di <https://tapol.org/id/publications/peran-militer-dalam-rencana-food-estate> dan TAPOL & awasMIFEE!, “Perampasan Tanah dengan Dalih Pandemi: Siapa yang Diuntungkan dari Food Estate di West Papua?”, April 2022, tersedia di <https://tapol.org/id/publications/perampasan-tanah-dengan-dalih-pandemi-siapa-yang-diuntungkan-dari-food-estate-di-west>.

⁴ BBC, “Kisah ‘Keberhasilan’ masyarakat adat Knasaimos di Papua, apa konsekuensinya dan bisakah ditiru masyarakat adat lain?”, 13 Juni 2024, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp998d0ymmxo>.

⁵ “All Eyes on Papua” viral di Instagram. Kampanye ini diluncurkan untuk diselaraskan dengan kampanye “All Eyes on Rafah”, yang mengacu pada sebuah wilayah di Palestina yang diserang oleh Israel. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah dengan menggunakan kasus litigasi Suku Awyu dari Boven Digoel. Lihat juga BBC, ‘All Eyes on Papua - ‘Mengapa baru sekarang ramai-ramai bicarakan persoalan di Papua’?’, 6 Juni 2024, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxee799052xo>.

⁶ Lihat <https://permanentpeopletribunal.org/london-27th-29th-june-2024-ppt-session-on-state-and-environmental-violence-in-west-papua/?lang=en>.

dari para aktivis dan mantan tahanan politik Papua, aktivis LSM HAM nasional dan internasional. Tema tentang tahanan politik Papua diangkat dalam sebuah laporan yang diajukan oleh TAPOL, organisasi HAM yang berbasis di Inggris.⁷

Kasus-Kasus Baru

Selama periode ini, kami melihat serangkaian penangkapan sewenang-wenang di West Papua. Pertama, pada 1 dan 2 April, personel polisi dan militer menangkap 77 demonstran yang mengidentifikasi diri mereka sebagai **Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme (FMRPAM)**. FMRPAM adalah koalisi longgar dari berbagai organisasi mahasiswa Papua. Pada 1 April, Kepolisian Sektor Heram menangkap 15 aktivis Papua (semuanya laki-laki) di Sentani, Kabupaten Jayapura, karena membagikan selebaran berisi ajakan demo kepada masyarakat, agar mereka bergabung dalam aksi protes damai keesokan harinya. Organisasi-organisasi HAM telah mendokumentasikan beberapa kasus ketika polisi mencegah para aktivis Papua untuk mengorganisir pertemuan damai meskipun Undang-Undang UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberi jaminan yang kuat untuk berkumpul secara damai dan tidak mengharuskan adanya izin dari kepolisian.⁸ Semua pengunjung rasa yang ditangkap dibebaskan tanpa dakwaan pada hari yang sama oleh Kepolisian Heram.



Para demonstran FMRPAM bersiap untuk mengadakan demonstrasi “Papua Darurat Militerisme” di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa, 4 April 2024.

Sumber: FMRPAM

⁷ TAPOL, “Submission to the Permanent Peoples’ Tribunal on West Papua (27-29 June 2024 in London, UK)”, Juni 2022, tersedia di <https://tapol.org/media/73>.

⁸ TAPOL, Asia Justice and Rights (AJAR); Alliance of Democracy for Papua (AIDP); Justice Peace and Integrity of Creation GKI Tanah Papua, AVAA, and Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka), “Joint Submission for the 2nd periodic report of Indonesia in the 140th Session of the ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights”, tersedia di https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FCSS%2FIDN%2F57371&Lang=en.

Pada 2 April, aparat kepolisian dan personel militer menangkap 62 orang demonstran (laki-laki dan perempuan) di daerah Sentani, Kab. Jayapura. Para demonstran ingin berjalan menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, tapi polisi memblokir mereka dan hanya mengizinkan beberapa perwakilan demonstran untuk melewati gedung tersebut. Hal ini memicu bentrokan, beberapa pengunjung rasa melempari aparat keamanan dengan batu dan melukai sedikitnya tiga personel polisi.⁹ Polisi juga dilaporkan memukuli para demonstran saat melakukan penangkapan.¹⁰ Sekali lagi, semua orang yang ditangkap dibebaskan tanpa dakwaan oleh polisi pada hari yang sama.

Aksi ini diselenggarakan oleh FMRPAM untuk memprotes kasus penyiksaan di Kabupaten Puncak pada Februari, yang viral setelah video penyiksaan diunggah ke media sosial.¹¹ FMRPAM menuntut pertanggungjawaban penuh bagi para pelaku dan demiliterisasi di West Papua, serta jaminan tidak akan terulangnya pelanggaran HAM serupa.

Kedua, Kepolisian Nabire menangkap **14 siswa sekolah menengah atas (SMA)** dan **satu mahasiswa** pada 6 Mei setelah mereka mengecat seragam dengan motif Bintang Kejora, yang



diasosiasikan dengan kemerdekaan West Papua, dan mengadakan konvoi perayaan kelulusan di Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah. Polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan gas air mata dan peluru tajam untuk membubarkan konvoi tersebut.¹² Semua pelajar yang ditangkap telah dibebaskan tanpa dakwaan pada 7 Mei.

Pawai kelulusan siswa-siswi SMA di Nabire yang mengecat seragam mereka dengan motif Bintang Kejora.

Sumber: Fheshipphoto via Wagadei.id

⁹ Ceposonline, "Diduga Ada Penyusup, Tiga Anggota Polisi Jadi Korban dari Aksi FMRPAM", 3 April 2024, tersedia di <https://www.ceposonline.com/kota-jayapura/1994511008/diduga-ada-penyusup-tiga-anggota-polisi-jadi-korban-dari-aksi-fmrpam>.

¹⁰ Human Rights Monitor, "Police prevent peaceful protests against torture in Sentani and Jayapura City – 77 activists arrested in Sentani on 1 and 2 April, 3 April 2024", tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/police-prevent-peaceful-protests-against-torture-in-sentani-and-jayapura-city-77-activists-arrested-in-sentani-on-1-and-2-april/>.

¹¹ The Guardian, 'Indonesian military apologises after West Papuan man filmed being tortured in water-filled barrel', 25 Maret 2024, tersedia di <https://www.theguardian.com/australia-news/2024/mar/25/west-papuan-man-footage-torture-water-allegedly-indonesia>.

¹² LBH Papua, Siaran Pers, "Penangkapan Terhadap Pelajar dan Introgasi Terhadap Guru Akibat Tindakan Mencoret Pakaian Seragam Bermotif Bintang Kejora Adalah Tindakan Ilegal", 9 Mei 2024, tersedia di <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penangkapan-terhadap-pelajar-dan-introgasi-terhadap-guru-akibat-tindakan-mencoret-pakaian-seragam-bermotif-bintang-kejora-adalah-tindakan-ilegal/>.

Di Kabupaten Yahukimo, polisi juga dilaporkan menangkap dan menahan secara sewenang-wenang tiga orang warga, **Elai Matuan, Herako Labie** dan **istrinya**, di dekat rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yahukimo, 4 April 2024. Mereka diduga terlibat dengan kelompok bersenjata. Sejumlah peralatan kerja mereka disita, seperti kapak, sekop, pakaian, peralatan dapur, dan dua sepeda motor. Namun, keterlibatan mereka tidak terbukti, dan polisi membebaskan mereka tiga hari kemudian tanpa mengembalikan barang-barang yang disita.

Di Denpasar, Bali, 10 Juni 2024, polisi menangkap **empat mahasiswa Papua** dan **seorang pengacara HAM** karena berdemonstrasi menentang PSN di Merauke dan menyatakan solidaritas terhadap Suku Awyu dan Moi. Polisi membebaskan mereka pada hari yang sama.



Personel kepolisian membubarkan demonstrasi mahasiswa Papua yang melakukan aksi solidaritas terhadap Suku Awyu dan Moi yang tanah ulayatnya dirampas oleh perusahaan perkebunan, 10 Juni 2024. Sumber: LBH Bali

Papuans Behind Bars mencatat klaim dari kepolisian Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, bahwa mereka telah menahan **enam orang Papua**, tapi Papuans Behind Bars tidak dapat mengidentifikasi mereka. Sebuah siaran pers polisi menyatakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz melancarkan operasi terhadap TPNPB di wilayah Yahukimo pada 11 April. Dalam operasi tersebut, polisi mengklaim telah menembak mati dua buronan TPNPB (Afrika Heluka dan Toni Wetapo) yang diduga terlibat dalam pembunuhan personel polisi dan warga sipil, serta menangkap enam orang lainnya yang belum teridentifikasi.¹³

¹³ Suara.com, "Satgas Damai Cartenz Tembak Mati Dua Anggota OPM di Yahukimo", 12 April 2024, tersedia di <https://www.suara.com/news/2024/04/12/233500/satgas-damai-cartenz-tembak-mati-dua-anggota-opm-di-yahukimo> dan Antara, "Operation Peace Cartenz apprehend eight suspected Papuan rebels", 12 April 2024, tersedia di <https://en.antaranews.com/news/310608/operation-peace-cartenz-apprehend-eight-suspected-papuan-rebels>.

Dari 112 penangkapan sewenang-wenang antara April dan Juni, kami hanya mengidentifikasi tiga kasus yang diadili lebih lanjut. Aparat keamanan, yang bertindak di bawah Satgas Damai Cartenz, menangkap **Junius Waker** atau Lupa Waker di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada 21 Mei, atas dugaan keterlibatannya sebagai anggota kelompok bersenjata prokemerdekaan dan melakukan serangan terhadap sipil dan militer di wilayah Mimika. Aparat keamanan menyatakan bahwa Waker terlibat sebagai anggota TPNPB di bawah komando Goliat Tabuni sejak tahun 2015. Waker didakwa dengan Pasal 187 KUHP atas kejahatan yang membahayakan keselamatan umum bagi orang atau barang dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).¹⁴

Dua kasus lain yang dibawa ke pengadilan adalah **Anan Nawipa**, yang didakwa melakukan penyerangan terhadap seorang perwira militer, dan **Petrus Pekei**, yang didakwa melakukan pencurian senjata api. Keduanya disidangkan di Pengadilan Negeri Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Perkembangan Kasus

Pada 24 April, Pengadilan Negeri Sorong memvonis **Fatem Gelek** alias Gelek bersalah atas pembunuhan terhadap seorang anggota militer, Miskel Rumbiak, pada 20 Januari 2022 di Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, dan menjatuhkan hukuman baginya penjara seumur hidup. Fatem juga telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus penyerangan terhadap pos militer (Pos Koramil) yang menyebabkan empat anggota TNI meninggal dunia di Kisor, Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, 2 September 2021.¹⁵ Pada 4 Juni, Pengadilan Tinggi Papua Barat menguatkan vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sorong.

Pada 2 Mei, Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada **Arnius Kogoya** alias Arpin Kogoya alias Artis atas pembakaran rumah dan properti milik perusahaan di Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.¹⁶ Pengadilan pertama (Pengadilan Negeri Nabire) sebelumnya telah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Arnius Kogoya. Pada 28 Mei, masih tentang putusan banding, Pengadilan Tinggi Papua Barat juga meningkatkan hukuman terhadap Antonius Frabuku alias Anton dari 15 tahun penjara menjadi seumur hidup. Antonius Frabuku didakwa atas pembunuhan terhadap seorang anggota militer.¹⁷

¹⁴ Detik.com, “Jejak Kejahatan Anggota OPM Lupa Waker Pembakar Camp-Alat Berat di Puncak”, 21 Mei 2024, tersedia di <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7351767/jejak-kejahatan-anggota-opm-lupa-waker-pembakar-camp-alat-berat-di-puncak>, Viva, “Ditangkap di Tembagapura, Anggota KKB Lupa Waker Ternyata Terlibat Penembakan WNA di Kuala Kencana”, tersedia di <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1716223-ditangkap-di-tembagapura-anggota-kkb-lupa-waker-ternyata-terlibat-penembakan-wna-di-kuala-kencana>.

¹⁵ Lihat Papuans Behind Bars Quarterly “Overview January – March 2024”, tersedia di <https://papuansbehindbars.org/quarterly-update-january-march-2024/>.

¹⁶ Informasi lebih lanjut mengenai kasus Arnius Kogoya, lihat Papuans Behind Bars (PBB) “Annual Overview 2023”, hlm. 12, tersedia di <https://papuansbehindbars.org/annual-overview-2023/>. Lihat juga Papuans Behind Bars ‘Quarterly Overview January – March 2024’, tersedia di <https://papuansbehindbars.org/quarterly-update-january-march-2024/>.

¹⁷ Lihat Papuans Behind Bars ‘Quarterly Overview January – March 2024’, tersedia di <https://papuansbehindbars.org/quarterly-update-january-march-2024/>.

Pada 12 Juni 2024, hakim Pengadilan Negeri Serui memvonis empat orang Papua (**Phillips L Wanggai, Soleman Fonataba, Yuflius Frans Kareni, dan Gad Sendiairora Fonataba**) atas tuduhan makar berdasarkan Pasal 106 KUHP. Mereka berempat ditangkap pada 22 Januari 2024. Phillips dan Soleman dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, sementara Yuflius dan Gad masing-masing dihukum satu tahun enam bulan.

Pada 28 Juni, Pengadilan Negeri Nabire memvonis **Alenus Tabuni** alias Komputer atau Kobuter, seorang anggota TPNPB, bersalah melakukan pembakaran dan tindakan kekerasan lainnya, dan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara. Satgas Damai Cartenz menangkap Alenus Tabuni di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pada 18 Februari 2024. Polisi menyatakan bahwa Alenus Tabuni adalah mantan anggota kelompok Goliat Tabuni dan kini bergabung dengan kelompok Numbuk Telenggen. Alenus juga diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, penembakan, dan pembakaran, yang semuanya terjadi pada tahun 2021.

Isu-Isu yang Menjadi Perhatian

Selama periode ini, kami juga mendokumentasikan pelanggaran HAM serius terhadap tahanan politik Papua, termasuk eksekusi di luar hukum, dan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.

Satgas Damai Cartenz menangkap dan menembak mati dua orang yang diduga anggota TPNPB, **Afrika Heluka** dan **Toni Wetapo**, pada 11 April 2024. Mereka berdua diduga sebagai anggota kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan terhadap aparat keamanan. Dalam pernyataan media, polisi tidak menyebutkan alasan eksekusi terhadap kedua orang tersebut, misalnya, apakah mereka melakukan perlawanan atau tidak.¹⁸ Polisi hanya menguraikan tindakan yang diduga dilakukan oleh Afrika dan Toni, dan mengatakan bahwa ini merupakan pesan yang kuat kepada kelompok bersenjata bahwa tindakan mereka akan ditanggapi dengan penegakan hukum yang tegas. Selama operasi ini, aparat keamanan juga dilaporkan menangkap enam orang yang mereka duga sebagai anggota TPNPB. Hingga akhir Juni 2024, belum ada kabar lebih lanjut mengenai nasib keenam orang tersebut.

Personel militer Indonesia juga diduga telah menangkap, menahan, dan mengeksekusi seorang anggota TPNPB, **Atinus Kum**, yang ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024, dan ditahan serta diinterogasi di bawah penyiksaan selama lima hari. Tentara dilaporkan menginterogasinya untuk mencari pemimpin kelompok bersenjata, Aibon Kogoya. Atinus dieksekusi setelah tentara merasa gagal menemukan Aibon di tempat yang disebutkan Atinus. Tentara dilaporkan membakar beberapa rumah adat di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, dan melemparkan Atinus ke dalam rumah yang terbakar, lalu menembaknya. Sebuah laporan juga menemukan bahwa beberapa informan melihat bahwa mayat Atinus telah dimutilasi oleh tentara sebelum dibakar di dalam pos.¹⁹

¹⁸ Tempo.co, "Satgas Operasi Damai Cartenz Tangkap Anggota OPM Afrika Heluka, DPO Kasus Penembakan Anggota Polres Yahukimo", 12 April 2024, tersedia di <https://www.tempo.co/hukum/satgas-operasi-damai-cartenz-tangkap-anggota-opm-afrika-heluka-dpo-kasus-penembakan-anggota-polres-yahukimo--68658>.

¹⁹ Human Rights Monitor, "Military members accused of executing Papuan rebel and disappearing body in Intan Jaya", 5 Juli 2024, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-alleged-executing-papuan-rebel-in-intan-jaya-and-disappearing-the-body/>.

Papuans Behind Bars bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan transparan, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung bagi para tahanan dan mempromosikan debat juga kampanye yang lebih luas untuk mendukung kebebasan berekspresi di West Papua.

Papuans Behind Bars adalah upaya kolektif yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerja sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Ini adalah inisiatif akar rumput yang mewakili kolaborasi luas antara pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, jurnalis dan individu di West Papua, serta LSM yang berbasis di Jakarta dan kelompok solidaritas internasional.

Pertanyaan, komentar, dan koreksi, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami di info@papuansbehindbars.org

Kunjungi papuansbehindbars.org untuk informasi terbaru tentang tahanan politik West Papua.

